

Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar

Zahratunnisa Ramadhani*¹, Mabrurah²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Brawijaya, Bantul Yogyakarta, Indonesia

e-mail: *zahratunnisa.r.psc20@mail.umy.ac.id, mabrurah.psc20@mail.umy.ac.id.

Abstract

On 1 February 2021 Myanmar's democratization was once again threatened, following a military junta coup against the Government of Myanmar, by detaining several leaders, including Myanmar President Win Myint and Aung san suu kyi, the State Advisor. This study aims to analyze the Indonesia government's efforts to disarm the current conflict in Myanmar, while still respecting the principle of non-intervention, a mutual agreement between the ASEAN members. The method of research chosen is qualitative descriptive using techniques used for data collection through journals, papers, web sites and other reliable sources. Moreover, to strengthen the argument, the author uses the constructivism theory of Alexander Went which is linked by an analysis of Indonesia's efforts in the conflict in Myanmar. This study focuses on the effect of the ASEAN non-intervention principle on Indonesia's conflict resolution efforts. The results of this study show that the application of the ASEAN principle of non-intervention by ASEAN on the one hand gives Member States the flexibility to solve their internal problems without any interference from other countries. however, on the other hand, this principle becomes a barrier for ASEAN member countries to implement certain mechanisms in some cases, such as the current case of the coup conflict.

Keywords : *The principle of non-intervention, Myanmar Conflict, Negotiation*

Abstrak

Pada tanggal 1 Februari 2021, demokratisasi Myanmar kembali terancam, dikarenakan pelaksanaan kudeta yang dilakukan oleh Junta militer terhadap pemerintahan Myanmar, dengan cara menahan beberapa pimpinan dari pemerintahan sipil, diantaranya yaitu presiden Myanmar, Win Myint, dan penasihat negara, Aung san suu kyi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meredakan konflik yang sedang terjadi di Myanmar, dengan tetap mematuhi prinsip non intervensi yang merupakan kesepakatan bersama diantara anggota ASEAN. Metode penelitian yang dipilih adalah kualitatif deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data melalui jurnal, artikel, website internet dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Disamping itu untuk memperkuat argumentasi, penulis menggunakan teori konstruktivisme milik Alexander Went, yang akan dikaitkan dengan analisis mengenai upaya Indonesia dalam konflik kudeta Myanmar. Penelitian ini berfokus pada pengaruh dari prinsip non intervensi ASEAN terhadap upaya penanganan konflik yang dilakukan oleh Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disatu sisi penerapan prinsip non intervensi ASEAN yang dilakukan oleh ASEAN memberikan kelonggaran bagi negara-negara anggota untuk mengatur permasalahan internalnya, tanpa ada campur tangan dari negara lain. akan tetapi, di sisi lain, prinsip ini menjadi penghalang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan mekanisme tertentu dalam beberapa kasus, seperti kasus konflik kudeta yang sedang terjadi sekarang ini.

Kata Kunci : *Prinsip Non-Intervensi, Konflik Myanmar, Negosiasi*

1. Pendahuluan

Myanmar atau lebih dikenal dengan Republic of Myanmar, merupakan salah satu negara yang sebagian besar perjalanannya diwarnai oleh pergolakan konflik internal, baik dalam hal politik, sosial maupun ekonomi. Permasalahan yang terjadi di Myanmar sebagian besar disebabkan oleh adanya ketidakstabilan politik yang merupakan akibat dari berkuasanya rezim otoriter di Myanmar. Kondisi sudah terjadi sejak tahun 1962, dimana pada waktu itu Junta militer memperoleh kekuasaannya melalui kudeta militer yang dipimpin oleh Jendral Ne win. Kudeta militer inilah yang kemudian menjadi awal dari keruntuhan demokrasi di Myanmar. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada militer, seluruh aspek baik dalam pemerintahan maupun masyarakat juga diambil alih oleh militer (Wema Styadinata, 2014:2). Junta militer dikenal dengan kediktatorannya yang seringkali menuai kecaman dari dunia internasional. Sejak tahun 1962, catatan politik Burma menjadi salah satu yang terburuk di dunia, dikarenakan militer Myanmar yang membangun kekuatannya melalui penindasan, penahanan sewenang-wenang dan eksekusi, penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, penggunaan tentara anak, penggunaan warga sipil sebagai tukang kuli dan penyapu ranjau.

Konflik yang terjadi yang didasari atas tuduhan yang dikeluarkan oleh Junta Militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil yang telah menganggap bahwa ada kecurangan pemilu pada akhirnya berbuntut panjang dan berakhir dengan ditahannya Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin sah Myanmar. Insiden kudeta tersebut kemudian memancing amarah rakyat Myanmar dan konflik terus mengalir sehingga menimbulkan banyak polemik dan kekacauan dalam negeri Myanmar. Kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan lebih dari 700 ribu korban jiwa pada akhirnya menyedot perhatian dunia. Masyarakat internasional berbondong-bondong mengecam tindakan yang

dilakukan oleh Junta Militer. Kecaman juga datang dari negara-negara anggota PBB dan juga negara anggota-anggota ASEAN. Dalam menyikapi permasalahannya yang terjadi, ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik di Myanmar juga belum bisa berbuat banyak. Hal ini karena ASEAN tersandera oleh doktrin dan prinsip tidak saling mengintervensi (*non-interference principle*) urusan internal masing-masing negara yang harus dihormati (Sundari, 2021:179). Mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN sesuai dengan prinsip yang tertera pada piagam ASEAN yang mana prinsip non-intervensi menjadi landasan pokok kaitannya dalam penyelesaian konflik yang terjadi di negara anggotanya. Begitupula dengan Indonesia dan Myanmar yang tetap memegang teguh prinsip non-intervensi yaitu melarang negara anggota mencampuri urusan domestik anggota ASEAN lain. Bagi negara-negara anggota ASEAN, prinsip non-intervensi adalah sebagai jaminan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga. Tetapi, dalam perkembangannya, prinsip non-intervensi menjelma begitu kaku dan justru menyabotase upaya-upaya kolektif penegakan keadilan yang berkaitan dengan kemanusiaan di negara-negara termasuk juga dalam kasus konflik kudeta ini (Ikhsani, 2019:124).

Namun dalam hambatan prinsip non-Intervensi dan sikap tertutup serta respon yang ditunjukkan oleh Myanmar, melalui *shuttle diplomacy*, Indonesia berhasil melakukan negosiasi terhadap Myanmar demi upaya membantu menyelesaikan konflik kudeta yang terjadi. Disamping itu, KTT ASEAN Jakarta 2021 berhasil diselenggarakan atas inisiasi Indonesia dibantu dengan negara-negara anggota lain merupakan upaya lanjutan yang juga dinilai berhasil untuk meredam konflik dan memberikan solusi penyelesaian di Myanmar.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konstruktivisme yang difokuskan pada konsep identitas, norma, dan peran yang seringkali menjadi pertimbangan para aktor internasional terutama negara dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan di lingkup internasional. Pendekatan konstruktivisme, mengatakan bahwa terdapat pengaruh aspek non-material dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, diantaranya melalui dua konsep dasar yaitu, konsep identitas dan norma. Dalam hal ini, tindakan atau perilaku yang diterapkan oleh para aktor internasional, didasarkan pada identifikasi mereka terhadap keberadaan aktor lain dan respon mereka terhadap kaedah interaksi yang berlaku dalam lingkungan tertentu (Sato & Hirata, 2008). Menurut pemahaman tersebut, kebijakan luar negeri suatu negara dapat diartikan sebagai respon kognitif, psikologis dan sosial, serta merupakan konstruksi sosial yang menghasilkan identitas dan kepentingan negara (Beach, 2012:234). Pendekatan konstruktivis terkait orientasi kebijakan luar negeri bersifat humanis (*human-centric approach*), yang berarti bahwa faktor intrinsik yang ada didalam setiap aktor (individu) juga berperan penting dalam sebuah proses politik, dalam rangka menentukan arah tindakan tertentu dari suatu negara (Dugis, 2018:169).

Perdebatan dalam hubungan internasional saat ini, antara konstruktivis dan rasionalis berpusat pada pembahasan terkait alasan di balik perilaku negara dalam sistem internasional. Penganut konstruktivisme berasumsi bahwa kekuatan budaya, norma dan nilai memiliki dampak besar pada orientasi hubungan eksternal negara, sedangkan rasionalis berpendapat bahwa negara mendasarkan hubungan mereka pada

kepentingan material. Dalam hal ini, kaum rasionalis melihat bantuan luar negeri sebagai alat dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai keuntungan diplomatik dan ekonomi. Pandangan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan kaum konstruktivis, yang melihat bahwa bantuan asing didorong oleh moral dan kekuatan budaya, seperti ide dan identitas yang membuat negara memberikan bantuan (Almezaini, 2012:2).

Konstruktivis menekankan aspek budaya, dimana ia percaya bahwa negara dipengaruhi oleh 'faktor sosial' seperti ide dan norma (Almezaini, 2012:4). Konstruktivisme, berpendapat bahwa perilaku dalam hubungan internasional tidak berasal dari kepentingan, melainkan dimotivasi oleh identitas, norma, keyakinan, dan nilai. Akibatnya, 'faktor ideasional' ini dapat membangun lingkungan yang ditentukan oleh kepentingan tertentu. Faktor ideasional mempengaruhi pola perilaku pembuat keputusan sehingga membedakannya dengan perilaku aktor lain. Bagi kaum konstruktivis, *security dilemmas* dan anarki dalam sistem internasional diciptakan oleh negara itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Alexander Wendt dalam (1992: 391–425), *anarchy is what states make of it*. Wendt berpendapat bahwa negara mampu mengubah kondisi anarki dan mengembangkan sistem interaksi baru, meskipun, dalam kondisi anarki, aktor mungkin dimotivasi oleh kepentingan selain kekuasaan dan kepentingan material saja (Wendt, 1999). Dalam hal ini, unsur budaya seperti nilai dan norma dapat membentuk kepentingan nasional atau kebijakan keamanan, serta membentuk identitas suatu negara. Isu-isu seperti hak asasi manusia atau kemiskinan dapat menjadi preferensi aktor dalam pengambilan keputusan secara umum. Oleh karena itu, identitas suatu negara menghasilkan dan membentuk kepentingan negara tersebut (Jepperson et. al., 1996:10).

Para penganut konstruktivisme menekankan bahwa terdapat pengaruh faktor identitas dalam pembuatan suatu kebijakan.

Dalam Hubungan Internasional, pendekatan konstruktivis juga menganalisis sebab-akibat dari struktur pada identitas dan kepentingan. Dalam hal ini negara sebagai aktor dapat memiliki atribut yang mencakup kualitas antropomorfik seperti identitas, kepentingan, dan intensionalitas. Para penganut konstruktivisme memandang bahwa penerimaan maupun penolakan yang dilakukan dalam sebuah interaksi antar negara dilatarbelakangi oleh faktor konsensus. Karena itu, determinasi kekuatan fisik tidak terlalu efektif untuk menciptakan kepatuhan dalam sistem internasional, sebaliknya faktor-faktor non-fisik seperti kesepakatan bersama dapat mendorong negara-negara untuk patuh kepada kaidah internasional. Konstruktivis juga mengatakan bahwa dalam proses penerimaan norma internasional, terdapat perbedaan model sosialisasi, yang didasarkan pada karakter relasi sosial dan budaya yang berlangsung antar masing-masing aktor (Dugis, 2018:170).

Menurut konstruktivisme, pembuatan kebijakan luar negeri adalah sebuah proses interaksi yang melibatkan banyak aktor, yang meliputi struktur negara dan aspek masyarakat. Interaksi politik antar aktor menjadi lebih kompleks, karena tidak hanya didominasi oleh persaingan materi tetapi juga melibatkan gagasan, nilai dan institusi (Hill, 2003:159). Konstruktivis percaya bahwa serangkaian gagasan yang termasuk dalam standar norma internasional juga menentukan bagaimana aktor negara dan non-negara terlibat dalam arena internasional, tanpa mengabaikan peran dan efek pertimbangan kekuatan material (Dugis, 2018). Konstruktivisme kemudian dapat didefinisikan sebagai paradigma HI yang menekankan makna dan interpretasi bersama sebagai komponen analitis kritis dari tindakan para aktor. Konstruktivis lebih menekankan pentingnya peran ide daripada teori HI tradisional yang berkonsentrasi pada kepentingan komponen material (Katzenstein ed. 1996).

Terkait konsep identitas dalam lingkup konstruktivisme, penulis mengambil gagasan Alexander Wendt mengenai identitas dan kepentingan. Alexander Wendt merupakan salah satu tokoh yang mengutarakan gagasannya terkait konstruktivisme. Dalam pengertian filosofisnya, identitas adalah salah satu atribut yang membentuk tindakan atau perilaku tertentu. Identitas berada pada tingkat subjektif atau unit kualitas, berakar pada pemahaman diri aktor. Namun, identitas juga bergantung pada pemahaman dari aktor lainnya, sehingga identitas juga akan memiliki kualitas intersubjektif atau sistemik. Dengan kata lain, pembentukan Identitas harus didukung oleh faktor internal dan struktur eksternal (Wendt, 1999). Dalam teorinya, Wendt menekankan pentingnya *shared ideas* (gagasan bersama) dalam hubungan internasional. Ia menekankan, bahwa "identitas dan kepentingan pelaku tujuan dibangun oleh ide-ide bersama". Wendt tidak setuju dengan gagasan bahwa struktur asosiasi manusia dibangun oleh fenomena material, seperti yang didefinisikan oleh teori neorealisme dan neoliberalisme.

Namun dia tidak menyangkal adanya fakta obyektif, bahwa unsur material itu ada dan juga tidak bisa diabaikan. Wendt menjelaskan bahwa meskipun dia mengakui keberadaan faktor material, faktor-faktor ini tidak memainkan peran penting dalam teorinya, sebaliknya ia menunjukkan bahwa gagasan bersama adalah elemen terpenting dalam hubungan internasional menamakan asumsinya sebagai *rump materialism*. Wendt memaknai bahwa segala sesuatu memiliki basis material, misalnya badan untuk rakyat dan teritori bagi negara. Tapi, yang benar-benar membedakan identitas para aktor adalah gagasan bersama, seperti kesadaran dan ingatan (Wendt, 1999). Wendt (1999) mengilustrasikan pandangan konstruktivis dengan pernyataan berikut: '500 senjata nuklir Inggris yang jelas kurang mengancam Amerika Serikat daripada 5 senjata nuklir Korea Utara' karena 'Inggris adalah

teman dan Korea Utara tidak'. Karena itu, bukan fakta material tentang jumlah hulu ledak nuklir yang penting; yang penting bagaimana para aktor berpikir tentang satu sama lain, yaitu ide dan keyakinan mereka. Fakta material masuk ke gambar tetapi sekunder dari ide.

Wendt mengategorikan empat jenis identitas (Rosyidin, 2015), antara lain: (1) identitas personal atau *corporate identity* yaitu Identitas aktor yang terdiri dari struktur homeostatis yang membedakan aktor tersebut dari entitas lainnya. Identitas ini muncul dari kesadaran aktor itu sendiri tanpa memerlukan pihak lain. (2) identitas golongan atau *type identity* yaitu identitas yang menggolongkan suatu negara ke dalam kategori tertentu melalui interaksi internasional. Identitas ini dimiliki oleh suatu negara tanpa memerlukan pihak lain untuk membenarkannya. Mengacu pada kategori atau label sosial yang cocok untuk orang-orang yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang sama, dalam hal penampilan, fitur perilaku, sikap, nilai, keterampilan (misalnya bahasa), pengetahuan, pendapat, pengalaman, kesamaan sejarah (seperti wilayah atau tempat lahir), dll. (3) identitas peran atau *role identity* yakni identitas yang terbentuk atas dasar kedudukan aktor dalam suatu komunitas, sehingga identitas peran bergantung pada budaya dan lebih mengandalkan interaksi dengan aktor lain. Adapun Wendt mengatakan bahwa hal terpenting dalam mendefinisikan peran bukanlah suatu pelembagaan tetapi tingkat saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya (Wendt, 1999:228). Dengan kata lain, identitas peran terbentuk berdasarkan pada budaya dan harapan bersama, yang berarti identitas ini tidak dapat diberlakukan hanya pada diri sendiri, namun, terbentuk karena adanya posisi atau kedudukan tertentu suatu aktor dalam struktur sosial dan di sisi yang sama juga mengamati norma yang berlaku pada aktor lain yang memiliki identitas kontra yang relevan (Behraves, Maret 2011). (4) identitas kolektif atau *collective identity* yaitu kesamaan

pandangan dan pikiran antar negara dalam suatu kumpulan negara atau komunitas. Identitas ini didapat dari rasa solidaritas yang dimiliki negara karena tergabung dalam komunitas tertentu. Identitas kolektif adalah kombinasi unik dari identitas peran dan identitas tipe. Ia memiliki kekuatan kausal sehingga dapat mendorong aktor untuk mendefinisikan kepentingan orang lain sebagai bagian dari kepentingan pribadi, yaitu memungkinkan mereka untuk memiliki altruisme (Wendt, 1999:229).

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu negara dalam konteks Hubungan Internasional dilatarbelakangi oleh faktor identitas serta norma yang dimilikinya. Oleh karena itu, identitas dan norma memiliki peran penting dalam mendefinisikan kepentingan dan menentukan arah tindakan suatu negara. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan tindakan yang diambil oleh Indonesia untuk menangani isu kemanusiaan yang berkaitan dengan terjadinya kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Keputusan Indonesia untuk aktif terlibat dalam penanganan kasus kudeta Myanmar ini didorong oleh adanya beberapa kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia, diantaranya yaitu untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Myanmar serta mengembalikan sistem demokrasi yang ada di Myanmar. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara di Asia tenggara yang berhasil menerapkan sistem demokrasi, tentu saja merupakan sebuah identitas yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak secara aktif.

2.2 Kajian Pustaka

Di dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa sumber literatur dan penelitian terdahulu yang mendukung dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan tinjauan pustaka. Adapun

beberapa kajian pustaka yang dijadikan landasan sebagai berikut:

Penelitian pertama diambil dari jurnal yang bertajuk “*Diplomasi Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar di bawah Prinsip Non-Intervensi ASEAN*” yang ditulis oleh Munadia Ikhsani pada tahun 2019. Jurnal yang dimuat di dalam Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah ini membahas tentang bagaimana cara diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap negara Myanmar dalam upaya untuk membantu etnis Rohingya yang tengah mengalami diskriminasi. Indonesia dan Myanmar sebagai negara yang merupakan anggota ASEAN mau tidak mau harus menerapkan prinsip non-intervensi ASEAN yang merupakan prinsip dasar yang termaktub dalam piagam ASEAN. Tetapi kemudian prinsip tersebut dinilai sangat kaku dan membuat sulit untuk mencapai penegakan HAM di negara-negara anggota ASEAN dan hal tersebut kemudian menjadi masalah kaitannya dalam hal penyelesaian konflik Rohingya. Namun, dalam sikap tertutup Myanmar dan tanggapan negatif terhadap negara-negara lain yang ingin mengakhiri konflik Rohingya, Indonesia berhasil melakukan diplomasi ke Myanmar dalam upaya untuk mengakhiri konflik etnis Rohingya, melalui Diplomasi Kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap Myanmar diwujudkan. Pertama, diplomasi kemanusiaan melalui keterlibatan konstruktif melalui *soft power* Indonesia, kemudian diplomasi kemanusiaan melalui peningkatan kapasitas dan yang terakhir melalui upaya rekonsiliasi. Dalam prakteknya kemudian, upaya diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia tidak secara tuntas menyelesaikan konflik yang ada tetapi hanya sebagai jalan untuk mengurangi penderitaan etnis Rohingya mengingat konflik terkait Rohingnya ini merupakan salah satu konflik yang sudah mengakar dan sudah sejak lama ada dan sentimen terhadap Rohingnya baik vertikal maupun horizontal tidak bisa dengan mudahnya dihilangkan.

Penelitian kedua, jurnal dengan judul “*Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar*” yang ditulis oleh Rio Sundari, Rendi Prayuda, dan Dian Venita Sary menjadi sumber literatur selanjutnya. Jurnal yang dimuat dalam jurnal NIARA yang diterbitkan pada tahun 2021 ini membahas tentang upaya diplomasi pemerintah Indonesia dalam mediasi konflik kemanusiaan di Myanmar. Masalah etnis Rohingnya bukanlah masalah sepele dan wajib dianggap sebagai kondisi yang memprihatinkan dan genting, hal tersebut yang juga dirasakan Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan dalam konflik ini, selain sebagai amanat UUD 1945 dalam menjaga perdamaian dunia, isu konflik ini juga berada dalam kawasan Asia Tenggara yang jika tidak diselesaikan dengan cepat akan berpengaruh pada keamanan regional. Masalah pengungsi etnis Rohingnya pada negara sekitarnya akan menjadi masalah baru bagi kawasan termasuk di Indonesia. Jumlah etnis Rohingnya yang tewas dan mengungsi dikarenakan konflik ini hingga tahun 2019 selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam upaya untuk menangani konflik etnis tersebut. Pertama, dilakukan pengajuan proposal dan mengusulkan formula 4+1 bagi masyarakat Rohingnya dimasa depan. Indonesia yang tergabung dalam OKI juga memanfaatkan organisasi ini karena dinilai cukup memberikan pengaruh besar selain OKI juga sebagai organisasi Islam terbesar di dunia untuk bisa menekan dan mendesak Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingnya. Terakhir dengan memberikan bantuan logistik dan melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam menyuarakan penyelesaian konflik melalui media massa secara massif.

Penelitian ketiga, milik Donald M. Seekins dengan judul, “*The February 1, 2021 Coup d’Etat in Burma: Some Reasons Why*”.

Penelitian ini menggambarkan tentang peristiwa kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada 2021, dan bagaimana kemudian masyarakat Myanmar melakukan demonstrasi terhadap Pemerintahan Junta militer Myanmar. Penelitian ini juga menggambarkan keterlibatan Tiongkok dalam krisis politik ini. Dalam hal ini, Beijing mendukung militer Myanmar melalui prinsip non-intervensi yang berkaitan dengan urusan dalam negeri suatu negara, kemudian Tiongkok juga berkepentingan bisnis dan mengambil keuntungan dari peluang ekonomi dalam negeri, terutama eksploitasi kekayaan Burma sumber daya alam.

Penelitian keempat, dengan judul "*Political Crisis in Myanmar and ASEAN intervention*", yang ditulis oleh Sita Hidriyah, berupaya menggambarkan upaya intervensi ASEAN sebagai tanggapan atas krisis politik di Myanmar. Dalam hal ini, kapasitas ASEAN sebagai organisasi regional tampak dibatasi pada prinsip non-intervensi yang tercantum dalam Piagam ASEAN. Ini artinya, setiap krisis politik di setiap negara anggota ASEAN ASEAN merupakan masalah internal. oleh karena itu, negara anggota ASEAN lainnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi. Dengan "intervensi", ditafsirkan sebagai mengganggu orang lain masalah lokal negara. Bagaimanapun, terkait konflik kudeta Myanmar, ASEAN sebagai organisasi yang bertujuan memperkuat demokrasi dan melindungi Hak Asasi Manusia harus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak demokrasi milik rakyat Myanmar. Namun sayangnya, dalam hal ini wewenang intervensi ASEAN sangat terbatas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian ini lebih menekankan pada peran Indonesia dalam menangani konflik kudeta Myanmar 2021 dengan menggunakan teori konstruktivisme milik Alexander Wendt. Dimana dalam hal ini upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan prinsip non-

intervensi ASEAN, sehingga banyak anggapan bahwa langkah Indonesia dalam menangani kudeta Myanmar ini masih kurang efektif. Sejauh ini, penelitian terkait peran Indonesia dalam konflik kudeta Myanmar 2021 masih belum banyak dibahas, dikarenakan isu yang diangkat masih terbilang baru. Oleh karena itu diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan pemikiran-pemikiran baru yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan terkait respon dunia internasional terhadap Konflik kudeta Myanmar yang terjadi pada tahun 2021.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, kualitatif dipilih sebagai metode dengan berfokus pada sifat pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena penulis ingin menjelaskan data secara mendalam dengan elaborasi penjelasan tanpa menggunakan angka. Disamping itu, data yang dihimpun digunakan untuk menguatkan argumentasi dan menjelaskan isu serta fenomena yang terjadi secara mendalam. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data sekunder, data sekunder yang dipilih difokuskan pada jenis studi kepustakaan atau dokumen yang sumber datanya dianalisis dari buku, jurnal, perjanjian Internasional (piagam PBB), makalah, artikel, serta situs-situs internet yang bermanfaat dengan objek yang diteliti. Hasil temuan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori konstruktivisme dengan melibatkan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan), hal ini dilakukan sebagai proses lanjutan untuk *men-declare* fakta yang akan diuraikan nantinya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Dinamika dan Sejarah Hubungan Indonesia-Myanmar

Indonesia dan Myanmar adalah dua dari sebelas negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kedua negara ini secara historis dan budaya memiliki banyak kesamaan. Hubungan Indonesia Myanmar secara historis sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan, fakta sejarah mengungkapkan bahwa Indonesia ketika masih berbentuk kerajaan-kerajaan pra-kemerdekaan telah menjalin kontak dengan wilayah yang sekarang menjadi negara Myanmar. Di dalam kitab *Negarakertagama*, disebutkan bahwa Majapahit telah menjalin hubungan baik dengan negeri bernama Marutma yang kemungkinan negara tersebut adalah Myanmar (Yusuf, 2013:25).

Secara bilateral, hubungan kedua negara sudah terjalin baik sejak era kolonialisme. Tetapi secara resmi hubungan Indonesia Myanmar dimulai sejak tahun 1949. Myanmar secara penuh mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia dari penjajah, sebaliknya Indonesia pun mendukung upaya Myanmar untuk terlepas dari penjajahan Inggris. Sejarah juga mencatat bahwa pada penyelenggaraan *Asian Relation Conference* di New Delhi tahun 1947, Myanmar ikut mendesak dilaksanakannya *Conference of Indonesia Affairs* yang mengutuk keras agresi militer yang dilakukan Belanda dengan mendesak negara itu untuk segera hengkang diri dari Indonesia (Nugroho, 2016). Disamping itu pula di tahun yang sama, cikal bakal Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar berhasil didirikan atas diizinkannya pembukaan *Indonesian Office* di Yangon oleh pemerintah Myanmar. Selain itu, Indonesia dan Myanmar juga memiliki sejarah perjuangan panjang dalam keikutsertaan konferensi internasional. Indonesia dan Myanmar merupakan perwakilan dua dari lima negara di tahun 1954 yang mengikuti konferensi Kolombo yang kemudian kelima negara tersebut memprakarsai digelarnya konferensi Asia-Afrika di tahun 1955. KAA dibentuk untuk mengembangkan solidaritas antar sesama negara Asia-Afrika yang juga mendukung

pembebasan negara-negara tersebut dari kungkungan imperialisme dan kolonialisme. Selain di dalam bidang politik khususnya sektor diplomatik, kedua negara juga menjalin hubungan dan kerjasama diberbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan keamanan. Di dalam bidang politik kedekatan Indonesia Myanmar ditunjukkan ketika pada tahun 2008 Indonesia mengadakan forum tahunan antar negara pertama di Asia yaitu *Bali Democracy Forum (BDF)* yang secara hormat mengundang Myanmar untuk ikut serta (Ikhsani, 2019). Forum ini mengangkat tema tentang demokrasi dan secara khusus membahas tentang praktik demokrasi di berbagai negara tetapi tidak menutup kemungkinan bagi negara non demokrasi untuk ikut serta di dalamnya yang mana salah satunya adalah Myanmar sebagai negara yang baru merintis proses dan memperkuat demokrasi di negaranya (Ikhsani, 2019). Kedekatan hubungan dengan Myanmar membuat Indonesia senantiasa berupaya aktif dalam proses penyelesaian di Myanmar, dengan mendukung proses demokratisasi di Myanmar dan rekonsiliasi nasional Myanmar, serta mengurangi keterisolasian Myanmar dari komunitas internasional. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyongsong demokratisasi Myanmar yang lebih baik dipandang perlu untuk dilakukan disamping untuk mempererat hubungan bilateral juga sebagai upaya pembuktian bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasinya sudah cukup matang untuk bisa ditiru oleh negara lain.

Kedekatan Indonesia Myanmar terus terjalin dengan diadakannya berbagai kunjungan yang diwakili oleh pemimpin dari masing-masing negara. Di tahun 2011, presiden Thein Sein lebih dulu mengunjungi Indonesia dengan fokus kunjungan untuk membahas peluang kerjasama antar Indonesia dan Myanmar di bidang politik, keamanan, ekonomi, perikanan, sosial budaya dan kekonsuleran. Selanjutnya pada tahun 2013, presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam tugas kenegaraannya beliau berkunjung menemui presiden Myanmar yang

baru, presiden Thei Sein. Pertemuan tersebut membahas tentang penguatan hubungan bilateral kedua negara. Tidak hanya itu, di era kepemimpinan presiden SBY melalui diplomasi kemanusiannya presiden SBY mengutus Menteri luar negeri Marty Natalegawa untuk aktif dan bekerjasama dengan kementerian Luar negeri Myanmar dalam menangani isu konflik etnis Rohingya.

Dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo, disaat gejolak isu Rakhine State tengah memanas dimana terjadi penyerangan pasukan keamanan Myanmar oleh kelompok bersenjata pada 25 Agustus 2017, pemerintah RI baik melalui tingkat pimpinan yaitu Menteri Luar Negeri maupun KBRI Yangon melakukan pendekatan kemanusiaan dalam menjaga dan membina hubungan bilateral dengan Uni Republik Myanmar (Ikhsani, 2019:26). Di tahun ini pula, bantuan kemanusiaan RI ke Myanmar di distribusikan dalam beberapa periode. Secara simbolis Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyerahkan bantuan dari RI kepada Menteri kesejahteraan Sosial Myanmar dengan disaksikan oleh chief of state Myanmar. Disamping itu, *PKPU Human Right* sebagai Lembaga kemanusiaan Indonesia berhasil membangun dua sekolah yang terleta di dua desa di Sittwe, Rakhine State tidak luput juga ikut diresmikan oleh Retno Marsudi. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa semakin mengerakan hubungan baik kedua negara, baik melalui kerjasama bilateral maupun bentuk-bentuk kerjasama lainnya. Pasang surut dan hubungan kedua negara diwarnai dengan beragam dinamika tetapi tidak pernah mengalami pemutusan diplomatik meskipun terdapat konflik-konflik internal yang terjadi diantara kedua negara.

4.2 Dinamika Konflik di Myanmar

Myanmar merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara, yang memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948 dari Inggris melauai perdamaian antara pemerintah

kolonial Inggris dan kaum nasionalis Burma, yang pada saat itu dipimpin oleh Thakin Nu (Irewati, 2016). Pada awalnya, Myanmar dikenal dengan sebutan Burma, namun pada tahun 1989, terdapat perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar. Sejak saat itu pemerintahan Myanmar didominasi oleh rezim Junta Militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw. Junta militer Myanmar dengan sistem kepemimpinannya yang otoriter memperoleh kekuasaannya melalui kudeta militer yang terjadi pada tahun 1962. Kudeta militer inilah yang menjadi awal dari keruntuhan sistem demokrasi di Myanmar (Kompas, Maret 2021).

Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada militer, seluruh aspek baik dalam pemerintahan maupun masyarakat juga diambil alih oleh militer. Sejak itu pula, Tatmadaw mempertahankan kekuasaannya dengan memblokir semua partai oposisi dan mengambil alih keseluruhan kegiatan bisnis dan industri di bawah kendali mereka, yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi Myanmar yang semakin memburuk, dan tingkat kemiskinan serta pengangguran meningkat. Tatmadaw dikenal dengan kediktatorannya yang seringkali menuai kecaman dari dunia internasional. Sejak tahun 1962, catatan politik Burma menjadi salah satu yang terburuk di dunia, dikarenakan militer Myanmar yang membangun kekuatannya melalui penindasan, penahanan sewenang-wenang dan eksekusi, penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, penggunaan tentara anak, penggunaan warga sipil sebagai tukang kuli dan penyapu ranjau (Satyadinata, 2014:2).

Kuatnya kekuasaan dari Junta Militer Myanmar membuatnya hampir tak tertandingi, sampai pada akhirnya masyarakat Myanmar terlibat dalam pemberontakan “8888” yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1988. Dalam aksi ini, mahasiswa dan aktivis pro demokrasi menyerukan protes terhadap Junta militer. Akan tetapi upaya pemberontakan ini tidak berakhir seperti yang diharapkan oleh

masyarakat. Dalam peristiwa ini, banyak warga sipil yang dibunuh, disiksa, dan dipenjara karena keterlibatan mereka. Namun, adanya pemberontakan ini, melahirkan Liga Nasional Demokrasi yang kemudian menjadi partai besar yang menyuarakan perlunya demokrasi dalam politik Myanmar. Pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi, menuntut agar militer menyerukan pemilihan pada tahun 1990 (p2P-Lipi, April 2021).

Meskipun begitu, Tatmadaw masih mendominasi sebagian besar pemerintahan Myanmar, dan terus menghalangi upaya demokratisasi rakyat Myanmar. Berkaitan dengan hal ini, Keterlibatan militer dalam upaya demokratisasi juga terjadi pada tahun 1990, dimana pada saat itu, Jenderal Saw Maung membatalkan hasil pemilu 27 Mei 1990 yang menghasilkan kemenangan bagi *National League for Democracy* (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Hasil pemilu membuktikan bahwa demokrasi memang yang diinginkan rakyat Myanmar, seperti yang ditunjukkan dengan kemenangan NLD tersebut, dimana NLD berhasil merebut sekitar 60% suara populer dan 392 kursi (Parline, April 2018). Sayangnya, militer menolak mengakui hasil pemilu tersebut dan malah melakukan penangkapan terhadap Aung Suu Kyi. Setelah peristiwa itu, Myanmar kembali diperintah oleh junta militer yang berada dibawah kepemimpinan Jenderal Than Shwe. Hingga tahun 2003, di bawah kekuasaan Jenderal Than Shwe, kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat Myanmar masih sangat didominasi oleh militer. Terkait Kondisi ini, David I. Steinberg menempatkan Myanmar sebagai "*The most monolithically military-controlled in the world*" (Firnias, 2003).

Namun kemudian pada bulan Februari tahun 2011, dunia perpolitikan Myanmar mengalami perubahan yang cukup besar, dimana terpilihnya Thein Sein sebagai presiden melalui pemilu tahun 2010, mengakhiri rezim otoriter yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah junta militer yang telah berkuasa

selama 50 tahun. Meskipun begitu, pemilu 2010 ini tidak luput dari pro dan kontra, dikarenakan pihak oposisi yang menyatakan adanya kecurangan yang terjadi, dimana dalam pemilu tersebut, USDP memenangkan kursi terbanyak sejumlah 883 dari 1.154 kursi di Parlemen (The Irrawady, Februari 2010). Dalam masa kepemimpinannya, Thein Sein mengeluarkan beberapa kebijakan besar yang mengedepankan sistem demokrasi. Salah satu kebijakannya yaitu membebaskan para tahanan politik yang pada masa pemerintahan sebelumnya ditangkap, tokoh besar Aung San Suu Kyi dan teman-temannya menjadi salah satu yang dibebaskan oleh Thein Sein (Krisman, 23 Mei 2012).

Seiring berjalannya waktu, keinginan rakyat Myanmar untuk memiliki pemerintahan demokrasi tetap teguh dan terus dipertahankan. Hal ini terlihat dari besarnya dukungan masyarakat terhadap Pemilu 2015 yang kembali dimenangkan NLD dengan memperoleh kursi sebanyak 77% (Theguardian, November 2015). Namun, Aung san suu kyi sebagai ketua dari NLD tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai presiden karena pernikahannya dengan orang asing, yang mana kemudian sebagai gantinya Suu Kyi diangkat sebagai penasihat negara (Mckirdy, 2016). Kemenangan NLD tersebut tidak lantas menjadikan Myanmar sebagai negara dengan sistem demokrasi demokrasi penuh. Tidak semua kursi di Hluttaw (parlemen) diperebutkan. Konstitusi yang dirancang militer menjamin bahwa perwakilan militer yang tidak dipilih mengambil 25% kursi di Hluttaw dan memiliki hak veto atas perubahan konstitusi. Inilah yang disebut para jenderal sebagai "*disciplined democracy*" (BBC, Desember 2015).

Pada November 2020, Myanmar melaksanakan pemilihan umum kembali, dan menghasilkan kemenangan bagi partai *National League for Democracy* (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Terkait hasil pemilu tersebut, partai oposisi pertama yaitu *Union*

Solidarity and Development Party (USDP), tidak terima dengan kemenangan partai NLD, dan menuduh adanya ketidakadilan dan kecurangan dalam pemilu November 2020 (VOA, September 2020). Kemudian atas dasar tuduhan tersebut, pada tanggal 1 Februari 2021, militer Burma (Tatmadaw) melakukan kudeta dalam rangka merebut kendali kekuasaan dari pemerintahan demokratis. Kudeta militer yang dilakukan oleh tatmadaw ini akan membawa Myanmar kembali dalam pemerintah yang diktator dan otoriter. Dalam aksi kudetanya, Militer Myanmar melakukan penangkapan terhadap beberapa pemimpin partai LND, diantaranya yaitu, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan telah mengumumkan penggantian sejumlah menteri. Tentara juga melakukan pemblokiran di ibu kota, Nay Pyi Taw dan kota utama, Yangon. Selain itu layanan komunikasi, seperti internet dan telepon juga terganggu (BBC, Februari 2021). Walaupun sudah banyak tekanan yang diberikan terhadap aksi kudeta Junta militer Myanmar, namun kondisi di Myanmar belum dapat dikatakan membaik dan malah semakin memburuk, dengan lebih banyak warga sipil yang terbunuh atau ditahan oleh militer.

4.3 Prinsip Non Intervensi ASEAN

Association of South East Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi regional yang didirikan secara resmi melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dilaksanakan pada 8 Agustus 1967. Tujuan awal dari pembentukan ASEAN salah satunya yaitu untuk mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah (Khotman, 1992). Sebagai organisasi regional kawasan Asia Tenggara, ASEAN tentu saja memiliki urgensi besar untuk terlibat dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan isu kemanusiaan, dimana hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utama ASEAN yaitu meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan

menghormati keadilan dan ketertiban hukum di dalam negara-negara di kawasan ASEAN.

Tujuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui penerapan Prinsip *non-interference*, yang terdapat dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC), 24 Februari 1976 yang dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa dalam menjalin hubungannya antar anggota, didasarkan pada prinsip fundamental yaitu: (a) menghormati kebebasan, kedaulatan, kesamaan, kesatuan wilayah dan identitas nasional setiap bangsa; (b) setiap negara memiliki hak untuk mengatur penyelenggaraan negaranya bebas dari intervensi eksternal; (c) adanya prinsip non-intervensi dalam hubungan internal sesama anggota. Dengan adanya pasal tersebut menguatkan eksistensi prinsip non-intervensi dalam kerangka kerja sama ASEAN (Rahmanto, 2017). Prinsip non intervensi ini diciptakan sebagai sebuah wujud perlindungan untuk menjamin kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara anggota dan dalam rangka mencegah adanya kemungkinan intervensi asing yang tidak diinginkan terhadap urusan dalam negeri dari masing-masing negara anggota.

Prinsip *non-interference* yang diterapkan oleh ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik lebih menekankan pada cara-cara diplomatik dan kekeluargaan. Seperti yang dikatakan perdana menteri Thailand pada pertemuan ASEAN ke-42 di Thailand, bahwa pendekatan secara halus (*ASEAN way*) lebih efektif untuk dilakukan daripada menggunakan pemberian sanksi kepada Myanmar. Pendekatan ASEAN way lebih berfokus pada proses diplomatik yaitu meyakinkan pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan ASEAN dalam rangka menekan tindak kekerasan di Myanmar yang masih cukup tinggi. ASEAN sendiri lebih memosisikan diri sebagai wadah atau media yang dapat digunakan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya. Salah satu

upaya ASEAN adalah pelaksanaan *The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC), pembentukan komisi khusus dalam rangka menangani konflik di Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar.

Namun, seiring berjalannya waktu, keefektifan dari prinsip non-intervensi tampaknya semakin banyak dipertanyakan, dikarenakan banyaknya tantangan dan isu-isu baru yang muncul dari proses globalisasi, serta tuntutan yang semakin besar untuk demokratisasi, dan meningkatnya perhatian internasional terhadap isu-isu kemanusiaan dibandingkan dengan isu kedaulatan negara. Dalam upayanya untuk mempertahankan efektivitas dan legitimasinya di kancah domestik dan internasional, cara tradisional ASEAN dalam melakukan urusan regional semakin menuai pro dan kontra, dimana keberadaan prinsip non-interferensi dianggap sebagai batu sandungan bagi kapasitas ASEAN untuk merespons masalah internal dan tantangan eksternal (Tan, 2011). Seperti yang dinyatakan Narine, *“It is the commitment to non-interference, and all of the complications that emerge from this principle, that is at the heart of the controversies over ASEAN’s development today”* (Narine, 2008).

4.4 Analisis upaya Indonesia dalam menangani Konflik kudeta Myanmar

Berbagai macam konflik yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya yang berkaitan dengan keamanan masyarakat kemudian mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk bersama-sama mengedepankan perhatian mereka terhadap isu kemanusiaan, seperti konflik yang sedang terjadi di Myanmar. Melihat kondisi Myanmar yang sedang mengalami konflik kudeta, tentu saja menimbulkan reaksi yang beragam dari negara-

negara lain, khususnya negara-negara anggota ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara. Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif dalam menyikapi permasalahan kudeta Myanmar tersebut.

Dalam kasus Myanmar, upaya diplomatik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia seringkali mendapatkan penolakan dari pemerintah Myanmar. Pada kondisi seperti itu, Indonesia tidak dapat melakukan banyak hal karena adanya penerapan prinsip *non-interference*. Di satu sisi, penerapan prinsip *non-interference* yang dilakukan oleh ASEAN memberikan kelonggaran dan kebebasan bagi negara-negara anggota untuk mengatur urusan internalnya. Negara memiliki kedaulatan penuh atas pengaturan dalam negerinya tanpa ada campur tangan dari negara lain. Akan tetapi, di sisi lain, prinsip ini sangat membatasi kewenangan negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan mekanisme-mekanisme tertentu dalam beberapa kasus. Hal ini berkaitan dengan pandangan Jorn Dosch, seorang peneliti Asia Pasific studies, Leeds University, yang mengatakan bahwa organisasi seperti ASEAN terlihat baik dalam peraturan, tetapi buruk dalam implementasinya (*Good on papers, lack of implementation*) (Wakhidah & Mas'ood, 2014:3). Prinsip non-interference yang diterapkan ASEAN selama ini memang telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian yang cukup baik (Triono, 2014). Akan tetapi kehadiran prinsip *non-interference* tersebut juga menjadi suatu hambatan yang cukup besar karena dinilai membatasi keterlibatan Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik kudeta di Myanmar. Sehingga pada akhirnya upaya yang dilakukan oleh Indonesia akan terwujud apabila pihak yang berkonflik bisa membuka diri serta membuka akses seluas-luasnya atas berbagai upaya pemberian bantuan yang ditawarkan oleh Indonesia.

Meskipun dibatasi oleh prinsip non-intervensi, Indonesia tetap berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan pihak militer Myanmar, melalui pendekatan yang lebih mengedepankan aktivitas diplomatik dan dialog. Berdasarkan konsep identitas dan kepentingan dalam pendekatan konstruktivisme milik Went, penulis menganalisis upaya dan peran aktif Indonesia dalam merespon konflik kudeta yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini, identitas Indonesia sebagai negara demokrasi yang cukup kuat khususnya di wilayah Asia Tenggara, tentu saja menjadi salah satu faktor pendorong bagi pemerintah Indonesia untuk bertindak secara tegas dalam kasus kudeta Myanmar ini. Kemudian, identitas Indonesia sebagai "jangkar" dalam lingkup ASEAN, dimana sekitar 50% penduduk ASEAN berada di Indonesia, juga menjadi faktor pendukung dari tindakan pemerintah Indonesia. Selain itu, seperti yang dijelaskan dalam pendekatan konstruktivisme, dimana tindakan yang diambil oleh suatu negara juga dipengaruhi oleh nilai dan norma serta interaksi antar dengan negara lain. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara Indonesia dan Myanmar yang sudah terjalin cukup lama.

Berdasarkan pemaparan konstruktivisme menurut Alexander Wendt, maka kemudian diperoleh keterkaitan antara faktor identitas dan norma dengan keputusan Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemerintahan militer Myanmar. Pemerintah Indonesia menunjukkan keprihatinan atas terganggunya upaya demokratisasi di Myanmar dengan memberikan beberapa statement, salah satunya yaitu statement yang mendesak semua pihak yang ada di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan dialog, sehingga situasi tidak semakin memburuk. Keinginan Indonesia untuk membantu Myanmar pertama kali diumumkan dalam pernyataan bersama antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin di Jakarta pada 5 Februari 2021. Selain itu, Melalui laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia juga

mengimbau agar Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, "di antaranya komitmen pada hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional" (BBC, Februari 2021).

Upaya aktif Indonesia juga terlihat dari aktivitas *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yaitu dengan berkunjung ke sejumlah negara ASEAN, diantaranya, Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand, dalam rangka berdiskusi dan berkonsultasi untuk mencari solusi bersama, terkait kudeta militer Myanmar. Dalam kunjungannya tersebut, menlu Retno Marsudi mengatakan "*Indonesia memilih tidak tinggal diam. Berpangku tangan bukanlah pilihan*". Selain itu, Di luar lingkup ASEAN, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia juga telah menjalin komunikasi dengan China, Australia, India, Jepang, Inggris serta utusan khusus sekjen PBB (BBC, Maret 2021).

Upaya lain ditunjukkan pada pertemuan KTT ASEAN Jakarta 2021 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 24 April bertempat di kantor kesekretariatan ASEAN, yang mana disamping secara khusus membahas upaya Myanmar keluar dari krisis kudeta Militer juga membahas pembangunan masyarakat ASEAN, hubungan eksternal ASEAN dan isu-isu regional serta internasional. Pertemuan ini merupakan pertemuan kali pertama secara fisik selama masa pandemi yang dihadiri oleh sembilan perwakilan pemimpin Asia Tenggara. Para petinggi negara yang tercatat hadir dalam konferensi ini adalah presiden Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Selain itu hadir pula petinggi negara lain seperti Menteri Luar Negeri Filipina, Menteri Luar Negeri Thailand, Menteri Luar Negeri Laos dan panglima junta Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Dalam

sambutanannya Retno Marsudi mengatakan bahwa “komitmen para pemimpin untuk bertemu secara fisik merupakan refleksi kekhawatiran yang dalam ASEAN terhadap situasi yang terjadi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis ini”. (KTT ASEAN 2021, Youtube).

Konferensi ini merupakan salah satu bentuk kerja keras Indonesia untuk memastikan ASEAN *Leaders Meeting* ini dapat terselenggara dengan baik. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa “perkembangan situasi di Myanmar merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas” (Kompastv, Mei 2021). Dalam sambutanannya presiden Joko Widodo juga menegaskan permintaan komitmen untuk Junta Militer Myanmar. Permintaan komitmen pertama bahwa harus dilaksanakan penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar, disaat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan. Permintaan komitmen kedua proses dialog yang inklusif harus dimulai, tahanan politik harus segera dilepaskan dan perlu dibentuk *special envoy* ASEAN yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar. Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre dan Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi (Kompastv, Mei 2021). Pertemuan tersebut dinilai berhasil oleh berbagai pihak karena telah menghasilkan beberapa lima kesepakatan konsensus yang garis besarnya sama dengan apa yang disampaikan oleh presiden Joko Widodo. Konsensus tersebut menegaskan bahwa kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan,

harus ada dialog konstruktif mencari solusi damai, ASEAN akan memfasilitasi mediasi, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan akan ada utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Kesuksesan konferensi ini dibarengi dengan disepakatinya proposal untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar oleh Jenderal Min Aung Hlaing walaupun kemudian hasil dari konsensus tersebut menimbulkan berbagai polemik dari warga Myanmar karena di dalam konsensus tidak disebutkan poin pembebasan tahanan politik dan tidak ada jaminan bagi 700 lebih demonstran yang menjadi korban kekerasan Militer Myanmar.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang saat ini tengah mengalami konflik yang sangat sulit untuk diselesaikan. Disamping karena terhalang oleh prinsip non-intervensi ASEAN, Myanmar juga cukup menutup diri dari intervensi negara lain di dalam urusan negaranya. Konflik kudeta yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan sipil yang terjadi pada 1 Februari lalu belum menemukan titik terang. Indonesia sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di ASEAN juga sebagai negara yang demokrasinya sudah cukup matang berani hadir untuk memberikan upaya dan juga solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, tetapi kembali lagi kepada regulasi di dalam piagam ASEAN yang memlimitasi intervensi terhadap negara anggota lain sehingga upaya-upaya penyelesaian konflik tidak bisa terealisasi secara maksimal. Berbagai upaya dan pendekatan diplomasi dilakukan Indonesia, melalui multitrack diplomasinya yang diimplementasikan dalam bentuk pertemuan dengan negara-negara ASEAN, juga berkoordinasi dengan sesama negara anggota PBB sebagai upaya serius untuk bisa segera mengatasi konflik ini dan level formal lain seperti G to G (*Government to Government*)

baik antara Indonesia dengan pemerintah Myanmar secara intens pun dilakukan.

Dengan menggunakan teori konstruktivisme dengan berfokus pada konsep identitas, penulis kemudian menganalisis kebijakan yang diambil Indonesia atas konflik yang terjadi di Myanmar dengan berkilat kepada konsep besar ini. Dalam pandangannya, konstruktivisme lebih menekankan kepada aspek budaya, dimana ia percaya bahwa negara dipengaruhi oleh 'faktor sosial' seperti ide dan norma. Konstruktivisme juga berpendapat bahwa perilaku dalam hubungan internasional tidak berasal dari kepentingan, melainkan dimotivasi oleh identitas, norma, keyakinan, dan nilai. Maka dari itu, definisi kepentingan dan penentuan arah tindakan satu negara ditentukan oleh identitas dan norma sehingga kebijakan yang diambil Indonesia kaitannya dalam mengupayakan pemulihan dan penyelesaian konflik kudeta pemerintahan oleh militer adalah refleksi dari kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara di Asia tenggara yang berhasil menerapkan sistem demokrasi, tentu saja merupakan sebuah identitas yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk bertindak secara aktif.

Berdasarkan uraian dari elaborasi diatas, pengaruh prinsip non intervensi ASEAN terhadap upaya negosiasi Indonesia dalam menangani konflik kudeta di Myanmar dapat dilihat melalui dua sisi. Pertama, penerapan prinsip *non-interference* yang dilakukan oleh ASEAN memberikan kelonggaran bagi negara-negara anggota untuk mengatur permasalahan internalnya, tanpa ada campur tangan dari negara lain. akan tetapi, di sisi lain, prinsip ini menjadi penghalang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk melaksanakan mekanisme-mekanisme tertentu dalam beberapa kasus, seperti kasus konflik kudeta yang sedang terjadi sekarang ini. Sehingga segala upaya yang dilakukan Indonesia akan bisa terlaksana secara maksimal apabila negara

yang dituju bisa membuka akses seluas-luasnya untuk menerima segala bentuk bantuan dari negara lain termasuk Indonesia. Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan sajian informasi yang diuat dalam tulisan ini bisa semakin memperkaya khazanah keilmuan dan dengan *multitrack* diplomasi yang dilakukan Indonesia bisa sepenuhnya diimplementasikan dalam praktek-praktek diplomasi.

Daftar Pustaka

- Adian, Muhamad Firnas. 2003 “Prospek Demokrasi di Myanmar”, dalam Jurnal Universitas Paramadina Vol. 2 No. 2, pp. 128-141.
- Almezaini, Khalid S. 2012. *The UAE and Foreign Policy Foreign, Aid, Identities and Interest*. USA: Routledge.
- Beach, D. (2012). *Analyzing Foreign Policy: Research Strategies and Methods*. *Analyzing Foreign Policy*, pp. 213–242.
- Behraves, Maysam. 2011. “The Thrust of Wendtian Constructivism”, dalam <http://www.e-ir.info/2011/03/09/the-thrust-of-wendtian-constructivism/> diakses 7 Juni 2021.
- Dugis, Visensio (Ed. Rev.). 2018. *Teori Hubungan Internasional: Perspektif Perspektif Klasik*. Surabaya: Arilangga University Press.
- Final Myanmar results show Aung San Suu Kyi's party won 77% of seats, The Guardian, dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/23/final-myanmar-results-show-aung-san-suu-kyis-party-won-77-of-seats> diakses 9 Juni 2021.
- Hasil Perhitungan Resmi Pemilu Myanmar Kukuhkan Kemenangan Partai Suu Kyi, Voa, september 2020 dalam <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-perhitungan-resmi-pemilu-myanmar->

- kukuhkan-kemenangan-partai-suu-kyi/5659389.html diakses 9 Juni 2021.
- Hill, C. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Ikhsani, Munadia. 2019. "Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar di Bawah Prinsip Non Intervensi ASEAN" dalam *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* Vol. 17 No. 2, pp. 85-166.
- Indra, Erizon. 2014. "Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak Campur Tangan Dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingnya di Myanmar" dalam *Journal of Internasional Relations*, Vol. 4 No. 3, pp. 376-383.
- Inter-Parliamentary Union, "Myanmar, Parliamentary Chamber: Pyithu Hluttaw," 27 May 1990, dalam http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/2388_90.htm diakses 10 Juni 2021.
- Irewati, Awani. 2016. "Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi" dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 4 No. 1, pp. 5-17.
- Jackson, Robert. & Sorensen, George (Ed). 2007. *Introduction to International Relations Theories and Approaches* Dritte. Oxford: Oxford University Press.
- Jepperson, Wendt, & Katzenstein. 1996. *Norms, Identity, and Culture in National Security. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Columbia University Press.
- Khanisa Krisman, Garis Awal Jalan Demokrasi Myanmar. Diakses dalam <http://www.politik.lipi.go.id/en/columns/politik-internasional/624-garis-awal-jalandemokrasi-myanmar.html>.
- Khoman, Thanat. 1992. "ASEAN Conception and Evolution", dalam www.asean.org diakses 30 Mei 2021.
- Kudeta Myanmar: Barat mengecam, Indonesia dan tiga negara ASEAN minta konflik diselesaikan melalui 'mekanisme hukum' dan 'dialog yang damai', BBC, februari 2021 dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55887214> diakses 15 Juni 2021.
- Kudeta Myanmar: Mengapa Indonesia diharapkan membantu mengatasi krisis politik 'sahabat lama'?. BBC. maret 2021 dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56222076> diakses (Juni 2021).
- Limsiritong, Nattapat. 2018. "Why ASEAN Fails to Play Role in the Rohingya Situation from the Perspective of ASEAN Charter", dalam *Asian Political Science Review* Vol. 1 No.2, pp. 73–79. <https://doi.org/10.12778/235108617x15452339029761>
- McKirby, Euan. 2016 "New government role created for Myanmar's Aung San Suu Kyi", dalam <https://edition.cnn.com/2016/04/06/asia/aung-san-suu-kyi-state-counsellor-role-created/index.html> diakses 7 Juni 2021.
- Myanmar's Military Coup and Political Crises: The Way Forward. April 2021. dalam <http://www.politik.lipi.go.id> diakses 9 Juni 2021.
- Myanmar's 2015 landmark elections explained. Desember 2015. dalam <https://www.bbc.com/news/world-asia-33547036> diakses 10 Juni 2021.
- Narine, Shaun. 2008. "Forty years of ASEAN: a historical review", dalam *The Pacific Review* Vol. 21 No. 4, pp. 411-429.

- Nugroho, Arifin Surya. 2016. "Soekarno dan Diplomasi Indonesia", dalam *Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 10 No. 2, pp. 125-131.
<https://dx.doi.org/10.17977/um020v10i22016p125>.
- Rahmato, T. Y. (2017). "Prinsip Non-Intervensi Bagi ASEAN Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Dalam *Jurnal HAM* Vol 8 No. 2, pp. 145-159
- Rosyidin, Mohamad. 2015. *The Power of Ideas Konstruktivisme dalm Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saragih, Hendra Maulana. 2017. "Indonesia dan Responsibility to Protect Etnis Muslim Rohingnya Myanmar", dalam *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* Vol. 2 No. 2, pp. 107-124.
- Sato, Y., & Hirata, K. (Eds.). (2008). *Norms, Interests, and Power in Japanese Foreign Policy*.
- Sundari, Rio., Rendy, Sary Prayuda, & Venita, Dian. 2021. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan di Myanmar" dalam *Jurnal Niara* Vol. 14 No. (1), pp. 177-187.
<https://doi.org/10.31849/niara.v14i1>
- Tan, See Seng. 2011. "Is Asia-Pacific Regionalism Outgrowing ASEAN?", dalam *The RUSI Journal* Vol. 156 No. 1, pp.58–62.
- The Irrawady, Burma Election 2010, Februari 2010, Vol. 18 No. 2, diakses dalam https://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=17712 diakses 11 Juni 2021.
- Triono. 2014. "Peran ASEAN dalam Penyelesaaian Konflik Etnis Rohingya" dalam *Jurnal TAPIs* Vol .10 No. 2, pp. 1-11.
- Wakhidah, W. & Mohtar, Mas'oed. 2014. *Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar*. UNSPECIFIED thesis, Studi Ilmu Hubungan Internasional: Universitas Gadjah Mada.
- Wema Satyadinata, K. *Upaya Menuju Demokrasi Di Myanmar Tahun 1990*. Skripsi: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics", dalam *International Organization* Vol. 46 No. 2, pp. 391-425.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics* First Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yusuf., Choirul F. 2013. *Dinamika Islam Filipina, Burma, dan Thailand* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013).
- Zartman, William., & Faure, Guy Oliver. 2005. *Escalation and Negotiation in International Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.